LAPORAN KEUANGAN TUTUP BUKU TA 2023

Laporan keuangan tutup buku merupakan laporan keuangan yang dihasilkan setelah proses tutup buku selesai dilakukan. Tutup buku sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan pada akhir periode akuntansi, seperti bulan, kuartal, atau tahun

NI KADEK RAFIKA DEWI, S.E.
SERDIK SPPK – POKJAR III
NO SERDIK: 202409002034

REALISASI BELANJA POLRI TA 2023

PAGU merupakan batas pengeluaran anggaran tertinggi yang dalam pelaksanaannya tidak boleh melebihi batas

- Realisasi s.d 31 Desember 2023 sebesar Rp.119,83 T atau mencapai 98,4% dari pagu
- Dilihat dari perkembangan tren tahun 2019 s.d 2023, pagu total Polri terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sedangkan untuk realisasi cenderung meningkat kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan presentasi realisasi.

RINCIAN BELANJA

PERKEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

CAPAIAN IKPA POLRI

Aspek IKPA	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	100	99,75	99,99	100	100
	Deviasi Halaman III DIPA	81,63	85,58	91,85	86,29	81,22
	Pagu Minus	90	98,09	99,88	-	-
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Data Kontrak	74	85	90	90,62	92,16
	Pengelolaan UP dan TUP	95	95	97	99,08	98,19
	UP Bendahara	98,31	99,54	99,67	-	-
	Dispensasi SPM	90	80	80	90	85
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	100	97,59	100	99,71	100
	Penyelesaian Tagihan	97,17	97,62	98,33	98,26	99,30
	Konformasi Capaian Output	-	98,49	95,48	99,45	99,85
	Retur SP2D	99,84	99,82	99,79	-	-
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Benkas	99,39	99,09	98,29	-	-
	Kesalahan SPM	90	90	90	-	-
NILAI IKPA		92,98	90,15	95,7	96,73	96,29

- Nilai IKPA Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami perbaikan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang menurun dan merupakan nilai IKPA terendah yaitu mencapai 90,15 (Baik). Sedangkan nilao IKPA tertinggi pada tahun 2022 yaitu 96,73 (Sangat Baik).
- Nilai indicator IKPA tahun 2023 yang belum optimal adalah Belanja Kontraktual (92,16), Deviasi Halaman III DIPA (81,22) dan Dispensasi SPM (85).

No.	Kode KL	Nama KL	NILAI
1	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	96,55
2	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	96,29
3	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	95,7
4	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	95,15
5	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	94,09
6	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	94,08

Peringkat ke-2 Dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

REKAP ISU PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2023

EPA Q1

Isu Penting

- Revisi anggaran belanja TIK membutuhkan rekomendasi clearance dari Kemenpan-RB dan Kemkominfo.
- Penetapan alokasi MP PNBP terpusat untuk Satker belum diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- Unit BLU lingkup Polri cenderung melakukan pengesahan belanja pada akhir triwulan

EPA Q2

Isu Penting

- Pengalokasian anggaran kontraktual yang bersifat direktif dan sulit diprediksi.
- Pengalokasian penarikan anggaran sekolah Pemula belum disesuaikan dengan kalender Kamtibmas.
- Belum dipenuhinya persyaratan seperti loan agreement atau nomor register untuk pencairan pagu kredit.

EPA Q3

Isu Penting

- Pembayaran Tunjangan Kinerja Satker lingkup Polri dilakukan secara terpusat, namun belum sesuai dengan PMK Nomor 20 Tahun 2023.
- Progres implementasi TTE Tersertifikasi untuk Satker lingkup Kepolisian Negara RI masih belum mencapai 100%.

EPA Q4

Isu Penting

- Terdapat potensi permasalahan pada akhir tahun terkait penyelesaian pekerjaan kontraktual dan pagu minus Belanja Pegawai.
- Belum optimalnya penyerapan anggaran kegiatan dengan karakter khusus, diantaranya yang bersifat direktif (KRO Operasi Bidang Keamanan) dan kegiatan Bakti Kesehatan terkait penanganan bencana.

- Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya